

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH

Perdana Novalita, Meyzi Heriyanto, dan Muchid

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Subrantas, Km 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

Abstract: Evaluation of Waste Management Policy. This study aims to find out and analyze the evaluation of waste management policy in Kecamatan Tampan Pekanbaru City. The type of this research is descriptive research. The research informants are Camat, RT, officers and community. Data collection techniques used in this study is to use interviews, documentation and observation. The results showed that after evaluation of waste management policy in Kecamatan Tampan Pekanbaru was good enough, although there are still shortages here, such as the socialization of waste management policies to the community, the provision of hygiene facilities and public awareness issues to protect the environment.

Keywords: evaluation of waste management policies, effectiveness, adequacy

Abstrak: Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Informan penelitian adalah Camat, RT, petugas dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sudah cukup baik, walaupun masih ada kekurangan di sana sini, seperti masalah sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah kepada masyarakat, penyediaan fasilitas kebersihan dan masalah sikap kepedulian masyarakat menjaga lingkungan.

Kata kunci: evaluasi kebijakan pengelolaan sampah, efektivitas, kecukupan

PENDAHULUAN

Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mengganggu kelestarian fungsi lingkungan baik lingkungan pemukiman, hutan, persawahan, sungai dan/atau lautan. Di kota-kota besar, permasalahan sampah menjadi

isu yang besar berkenaan dengan penanganannya yang masih menyisakan masalah baru. Volume sampah yang semakin bertambah dari hari ke hari, jenis sampah yang kian beragam, penyediaan tempat yang masih belum memadai, hingga perilaku masyarakat kita yang belum sepenuhnya mengerti dan faham akan pentingnya hidup bersih.

Pengelolaan sampah sementara ini dipandang hanya sebagai tanggungjawab pemerintah semata. Masyarakat lebih berperan hanya sebagai pihak yang dilayani, karena mereka merasa sudah cukup hanya dengan membayar uang retribusi sampah sehingga penanganan selanjutnya adalah menjadi tanggungjawab pemerintah. Padahal saat ini sudah ada sistem yang lebih baik dan efisien dan dianggap modern yaitu konsep *zero waste*, dengan menerapkan pengelolaan sampah secara terpadu,

mengurangi volume sampah dari sumbernya dengan cara daur ulang dan pengkomposan. Pengelolaan sampah di Indonesia menurut Enri Damanhuri (2003) terbagi menjadi 5 (lima) komponen sub sistem yang saling mendukung yaitu teknis operasional, pembiayaan, organisasi dan manajemen, peraturan (hukum/legalitas) dan peran serta masyarakat. Kelima komponen tersebut saling terkait dan harus berjalan secara terpadu, dalam menciptakan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.

Kota Pekanbaru yang merupakan salah satu di Provinsi Riau, permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya pengelolaan sampah, baik ditinjau dari pelayanan, biaya operasional dan pemeliharaan, kelembagaan, peraturan maupun peran serta masyarakat dalam pengelolannya. Pembiayaan pengelolaan sampah saat ini hanya didapat dari pendapatan yang diterima dari pembayaran sampah yang dibayarkan oleh masyarakat, padahal masih banyak kemungkinan pembiayaan dapat diperoleh dari pengelolaan sampah tersebut apabila dapat dikelola secara terpadu. Pemerintah Kota Pekanbaru sudah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah, namun belum berjalan dengan baik. Instansi yang bersangkutan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Pengelolaan persampahan di Kota Pekanbaru masih menggunakan sistem pengelolaan yang konvensional yaitu metode pengumpulan, pengangkutan ke TPS dan pemusnahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pengelolaan sampah ini sangat tergantung pada armada pengangkut sampah.

Seiring pertumbuhan penduduk yang pesat membuat produksi sampah di Pekanbaru juga meningkat. Setiap harinya masyarakat Pekanbaru memproduksi 500 ton sampah, meningkat dari 400 ton tahun lalu. Terdapat 92 kendaraan yang keluar masuk ke lokasi TPA untuk mengantar sampah hasil masyarakat Pekanbaru. Dengan frekwensi 2-3 kali sehari, 18 armada

milik DKP masuk mengantarkan sampah yang sudah dikumpulkan petugas kuning. Selain itu masih ada 10 kendaraan lainnya milik Dinas Pasar, serta beberapa kecamatan yang masuk ke TPA tersebut ditambah beberapa kendaraan pengangkut sampah yang merupakan swadaya masyarakat terutama di daerah perumahan. (<http://bappeda.pekanbaru.go.id>).

Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan yang memiliki penduduk yang relative besar, dimana produksi sampah di kecamatan ini mencapai angka yang paling tinggi. Sumber produksi sampah rata-rata dari pemukiman penduduk, karena pemukiman penduduk yang ada di daerah Tampan merupakan memiliki perumahan yang berkembang pesat sehingga produksi sampah dari daerah perumahan ini juga dapat dilihat lebih banyak dibandingkan dengan perumahan masyarakat yang bukan dalam bentuk perumahan. Pertanyaan penelitiannya adalah apakah kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sudah dikelola dengan baik ?. Oleh karena itu perlu diadakan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah, sehingga dapat diketahui dampak dari kebijakan tersebut.

Menurut R.J Kodoatie (2003), mendefinisikan sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat, setengah padat yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan (*refuse*) sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang, sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelangsungan hidup. Sedangkan Soewedo Hadiwiyoto (1983), "sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya, atau karena sudah tidak ada manfaatnya, yang ditinjau dari segi social ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian".

Pengertian evaluasi menurut Charles O. Jones dalam Aprilia (2009) adalah “*evaluation is an activity which can contribute greatly to the understanding and improvement of policy development and implementation*” (evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya). Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan kegiatannya. Konsep evaluasi kebijakan menurut Nugroho (2006) adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tugas pertanyaan pokok, yaitu: bagaimana kinerja implementasi publik?; faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu?; dan bagaimana strategi peningkatan kinerja?.

Menurut Dunn (2003) bahwa kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut: Efektifitas, apakah hasil yang diinginkan sudah tercapai?; Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?; Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?; Perataan, apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?; Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi dan nilai-nilai kelompok tertentu?; Ketepatan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

METODE

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Infor-

man penelitian adalah masyarakat, Camat, petugas, ketua RT dan Direktur Bank Sampah. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*interactive model of analysis*) dengan prosedur mulai dari pengajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Efektivitas

Dari hasil wawancara dengan informan mengenai efektifitas pengelolaan sampah dengan kondisi yang ada menunjukkan bahwa sampah masih saja berserakan dan dapat pula dikatakan bahwa pengelolaan sampah yang dilaksanakan di Kecamatan Tampan ini masih belum efektif.

Efisiensi

Dari hasil wawancara dengan masyarakat maka dapat diketahui masyarakat belum mengenal dan mengetahui dengan baik adanya sarana bank sampah serta bagaimana menjadi nasabah bank sampah, sehingga pengelolaan sampah oleh petugas bank sampah belum efisien.

Kecukupan

Dari jawaban warga masyarakat yang ikut langsung melihat kondisi pemerataan pengelolaan sampah memang dirasakan belum merata dan belum lancar pengurusannya, sehingga kondisi ini dapat menunjukkan pengelolaan sampah masih belum optimal dilaksanakan oleh pemerintah melalui kerjasama dengan pihak swasta. Kelancaran ini karena anggaran yang tersedia tidak lancar dan juga karena ketersediaan SDM dan fasilitas sampah yang terbatas.

Responsivitas

Dari hasil wawancara kepada warga masyarakat menunjukkan adanya kemampuan menanggapi berbagai masalah sampah dan kebersihan yang dihadapi warga masyarakat dan selama ini masih belum tampak, walaupun pemerintah kecamatan

menghimbau kepada warga masyarakat untuk bergotong royong dalam rangka membersihkan sampah yang tidak terjangkau oleh petugas kebersihan.

Ketepatan

Dari hasil wawancara dengan camat tersebut menunjukkan bahwa ketepatan kegiatan pengelolaan sampah yang tertuang dalam kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan daerah yang sangat membantu dan menjadi dasar legalitas pengelolaan sampah dan ini dapat membantu menyelesaikan masalah persampahan di daerah ini.

Setelah dilakukan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Tampah Kota Pekanbaru dapat dikatakan sudah cukup baik, walaupun masih ada kekurangan di sana sini, seperti masalah sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah kepada masyarakat, kemudian penyediaan fasilitas kebersihan seperti tempat pembuangan sampah sementara dan juga masalah sikap kepedulian masyarakat menjaga lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada berbagai pihak mulai dari warga masyarakat, petugas kebersihan, pemerintah kecamatan dan tokoh masyarakat mengenai faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan pengelolaan sampah masyarakat adalah:

1. Sosialisasikan kepada masyarakat akan aturan yang berlaku

Sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat amat terasa kurang dilakukan oleh pemerintah dan hal ini dapat menyebabkan perbedaan persepsi terhadap pengelolaan kebersihan, sehingga pengelolaan kebersihan masih terkesan belum optimal di lapangan. Peraturan daerah No 8 Tahun 2014 mengenai pengelolaan sampah perlu dengan baik disosialisasikan kepada masyarakat dan hal ini akan dapat menumbuhkan kesadaran dari warga masyarakat dalam berpartisipasi mengelola kebersi-

han dan tidak hanya mengandalkan dari pihak petugas kebersihan saja.

2. Ketersediaan Sumber Daya (SDM, Anggaran dan Fasilitas)

Dukungan sumber daya yang berbentuk sumber daya manusia, kemudian anggaran dan juga fasilitas. Berbicara sumber daya manusia, perlu adanya usaha untuk mengajak warga masyarakat berperilaku baik dan bergotong royong menjaga kebersihan, pemerintah kecamatan perlu menkampanyekan kebersihan lingkungan dan kesadaran lingkungan. Selain itu juga pelaksanaan pengelolaan sampah oleh petugas dengan menerapkan berbagai langkah guna mengajak masyarakat dengan tertib membayar iuran kebersihan dan ini dapat digunakan untuk membayar petugas kebersihan yang memungut sampah di lingkungan tempat tinggal warga.

Berkaitan dengan ketersediaan fasilitas kebersihan seperti tong sampah dan juga tempat pembuangan sampah sementara, memang perlu dipikirkan pemerintah. Hal ini dapat disiasati dengan menyediakan tempat pembuangan sampah yang lebih efisien dan bersih sehingga masyarakat sekitar TPS tidak merasa terganggu dengan keberadaan TPS di lingkungan tempat mereka tinggal. Selain masalah bau juga masalah tempat, pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan warga masyarakat untuk dapat menyewakan tempat meletakkan sampah sementara dan kompensasi yang diberikan pemerintah kepada warga akan menjadikan alasan disediakannya tempat yang layak untuk TPS.

3. Sikap Petugas Kebersihan

Petugas kebersihan memang mau bekerja menjaga kebersihan bila adanya bayaran yang sesuai. Hal ini sebagaimana pengalaman yang terjadi beberapa waktu lalu berkaitan dengan demonstrasi petugas kebersihan Karena belum mendapatkan bayaran dari pemerintah dalam usahanya menjaga kebersihan kota Pekanbaru. Pemerintah perlu memiliki komitmen yang kuat dalam rangka mewujudkan kota Pekanbaru bersih.

4. Dukungan dari masyarakat

Dukungan masyarakat kami rasakan semakin meningkat. Sebab pelaksanaan penertiban sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dukungan dapat terlihat dengan adanya sikap kooperatif masyarakat dalam setiap usaha pemerintah untuk mengajak gotong rotong

PEMBAHASAN

Setelah dilakukan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Tampah Kota Pekanbaru dapat dikatakan sudah cukup baik, walaupun masih ada kekurangan di sana sini, seperti masalah sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah kepada masyarakat, penyediaan fasilitas kebersihan tempat pembuangan sampah sementara dan sikap kepedulian masyarakat menjaga lingkungan. Dari 6 dimensi evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ada dimensi pokok yang sangat mendukung keberhasilan dalam kebijakan pengelolaan sampah yaitu dimensi efektivitas dan kecukupan. Efektifnya suatu kebijakan tergantung kecukupan anggaran yang tersedia, sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai. Berkenaan dengan seleksi alternatif terhadap suatu kebijakan, Bardach dalam Patton & Sawacki dalam Pasolong (2007) ada dua sub kriteria pokok yang perlu dibahas, yaitu *effectiveness* dan

adequacy. *effectiveness* menyangkut sampai seberapa jauh suatu kebijakan atau program akan mencapai apa yang diinginkan. Kriteria ini dapat diukur dalam jangka panjang atau pendek, langsung atau tidak langsung, secara kuantitatif atau tidak, dan pantas atau tidak (*adequate or inadequate*). Kriteria *adequacy* mempersoalkan seberapa jauh kebijakan atau program yang disarankan akan mampu memecahkan persoalan, apakah memecahkan persoalan secara keseluruhan atau hanya sebagian.

Selain itu Wimer dan Aida R.Vining dalam Pasolong (2007) mengatakan ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, yaitu (1) logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan; (2) hakekat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu *assembling* produktif dan (3) ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

SIMPULAN

Pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dikatakan sudah cukup baik, walaupun masih ada kekurangan di sana sini, seperti masalah sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah kepada masyarakat, penyediaan fasilitas kebersihan, tempat pembuangan sampah sementara dan masalah sikap kepedulian masyarakat menjaga lingkungan. Faktor yang menjadi kendala pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru antara lain: faktor sosialisasi aturan yang berlaku kepada masyarakat, ditambah dengan faktor keterbatasan sumberdaya (SDM, Anggaran dan Fasilitas), juga berkenaan dengan komitmen sikap petugas kebersihan dalam memungut sampah dan faktor dukungan dari masyarakat dalam peduli terhadap lingkungan sekitar.

DAFTAR RUJUKAN

- Dunn William, 2003, *Public Policy Analysis : An Introduction*. Englewood Cliffs. N.J. : Prectice - Hall. Inc.
- Dunn, William, 1981. *Public Policy Analysis. An Introduction*: Englewood Cliffs. N.J. : Prectice - Hall. Inc.
- Enri Damanhuri, 2003, “Permasalahan dan Alternatif Teknologi Penglolaan Sampah Kota di Indonesia,” Pro-siding Seminar Teknologi untuk Negeri, Vol. (I).
- Harbani Pasolong, 2007, Jakarta: *Teori Administrasi Publik*.
- Jones, Charles O., 1984, *An Introduction to the Study of Public Policy*, Third Edition, California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Nugroho, Riant D., 2006, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- Robert J. Kodoatie, 2003, *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Soewedo Hadiwiyoto, 1983, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta, Yayasan Idayu.